

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA. 018
PERIODE PELAPORAN 31 DESEMBER 2023
BPSIP BALI (*Audited*)
018.09.2200.633982.000.KD**



**JALAN BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN
DENPASAR - BALI**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Denpasar, 31 Desember 2023
Kepala Balai,


Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291999031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.3.1. Aset Tak Berwujud
 - C.3.2. Aset Lain-lain
 - C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Denpasar, 31 Desember 2023
Kepala Balai,

Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291999031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp39.465.250,00 atau mencapai 110,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp36.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp9.468.669,92800 atau mencapai 97,18% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.762.822.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp177.391.960.667,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp177.298.872.719,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp93.087.948,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp177.391.960.667,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.325.250,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.442.849.543,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-10.424.524.293,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-21.140.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-10.403.384.293,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp178.366.140.282,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-10.403.384.293,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.429.204.678,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp177.391.960.667,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	36.000.000	39.465.250	110	68.135.850
Jumlah Pendapatan		36.000.000	39.465.250	110	68.135.850
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.795.877.000	5.760.181.437	99	6.767.547.942
Belanja Barang	B.4.	3.966.945.000	3.708.488.491	93	2.543.581.001
Belanja Modal	B.5.	0	0	0	576.130.000
Jumlah Belanja		9.762.822.000	9.468.669.928	97	9.887.258.943,00

II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	162.802.640.000	162.802.640.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8.485.053.208	8.485.231.208
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15.395.612.329	15.395.612.329
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.003.550.000	1.003.550.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	112.190.100	112.190.100
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-10.500.172.918	-9.529.800.052
Jumlah Aset Tetap		177.298.872.719	178.269.423.585
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	193.612.000	823.046.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-100.524.052	-726.329.303
Jumlah Aset Lainnya		93.087.948	96.716.697
Jumlah Aset		177.391.960.667	178.366.140.282
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	177.391.960.667	178.366.140.282
Jumlah Ekuitas		177.391.960.667	178.366.140.282
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		177.391.960.667	178.366.140.282

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	18.325.250	44.135.850
JUMLAH PENDAPATAN		18.325.250	44.135.850
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.760.181.437	6.764.015.142
Beban Persediaan	D.3.	346.141.494	154.163.950
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.847.571.816	1.327.703.110
Beban Pemeliharaan	D.5.	547.899.383	494.412.359
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	966.875.798	564.966.582
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.		2.335.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	974.179.615	1.051.777.235
JUMLAH BEBAN		10.442.849.543	10.359.373.378
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.424.524.293)	(10.315.237.528)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0	24.000.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0	52.862.030
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	21.140.000	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		21.140.000	(28.862.030)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(10.403.384.293)	(10.344.099.558)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	178.366.140.282	178.891.116.747
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(10.403.384.293)	(10.334.099.558)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.429.204.678	9.819.123.093
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(974.179.615)	(524.976.465)
EKUITAS AKHIR	E.6.	177.391.960.667	178.366.140.282

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali

Tugas BPSIP Bali

Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.

Fungsi BPSIP Bali

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- f. Pengelolaan produk instrument hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dan;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	36.000.000	36.000.000
Jumlah Pendapatan	36.000.000	36.000.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.859.614.000	5.724.692.000
Belanja Lembur	71.185.000	71.185.000
Belanja Barang Operasional	599.596.000	599.596.000
Belanja Barang Non Operasional	354.481.000	953.949.000
Belanja Barang Persediaan	38.838.000	384.396.000
Belanja Jasa	276.461.000	482.861.000
Belanja Pemeliharaan	516.843.000	516.843.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	352.500.000	1.029.300.000
Jumlah Belanja	8.069.518.000,00	9.762.822.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.465.250,00 atau mencapai 110% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp36.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	36.000.000	18.325.250	51
Pendapatan Lain-Lain	0	21.140.000	#DIV/0!
Jumlah	36.000.000	39.465.250	110

Terdapat pendapatan lain-lain senilai Rp21.140.000,- yang merupakan pendapatan dari Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Akun	Jumlah	Keterangan
1	11 Oktober 2023	425911	15.460.000	Pengembalian tunjangan fungsional an. I Nym Sugama dan I.A. Putu Parwati
2	16 Nopember 2023	425911	1.380.000	Pengembalian tunjangan fungsional an. Putu Agus Kertawirawan
3	17 Nopember 2023	425911	4.000.000	Pengembalian tunjangan fungsional an. Ni Putu Sutami
4	29 Desember 2023	425911	300.000	Pengembalian tunjangan fungsional an. Ni Putu Sutami
	Jumlah		21.140.000	

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 73% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pendapatan dari pendapatan lain-lain. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	18.325.250	68.135.850	(272)
Pendapatan Lain-Lain	21.140.000	0	100
Jumlah	39.465.250	68.135.850	(73)

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp9.468.669.928,00 atau 97,0% dari anggaran belanja sebesar Rp9.762.822.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023

Uraian	2023			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		5.795.877.000	5.779.390.480	99,7
Belanja Barang		3.966.945.000	3.708.488.491	93,5
Total Belanja Kotor		9.762.822.000	9.487.878.971	97,2
Pengembalian Belanja			19.209.043	#DIV/0!
Total Belanja		9.762.822.000	9.468.669.928	97,0

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 4,33% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2023 tidak memiliki anggaran untuk Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	5.760.181.437	6.767.547.942	(17,49)
Belanja Barang	3.708.488.491	2.543.581.001	31,41
Belanja Modal		567.130.000	#DIV/0!
Total Belanja	9.468.669.928	9.878.258.943	(4,33)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.760.181.437,00 dan Rp6.767.547.942,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 17,49% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain :

- Adanya perpindahan PNS ke BRIN sebanyak 14 orang terdiri dari 13 orang peneliti dan 1 orang teknisi litkayasa .
- Adanya pegawai purna tugas/pensiun sebanyak 3 orang an. Ni Nyoman Sriyani, I Gusti Ayu Ngurah Astari dan Sri Utami Asih.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.708.365.480	6.663.157.942	(16,73)
Belanja Lembur	71.025.000	104.390.000	(46,98)
Jumlah Belanja Kotor	5.779.390.480	6.767.547.942	(17,10)
Pengembalian Belanja Pegawai	19.209.043	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	5.760.181.437	6.767.547.942	(17,49)

Terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp19.209.043,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pengembalian belanja gaji pokok PNS an. I Nyoman Arjana	218.000
2.	Pembulatan Gaji PNS	1.043
3.	Pengembalian Tunjangan Belanja Fungsional PNS an. I.A. Parwati, I Nyoman Sugama dan Putu Agus Kertawirawan	18.620.000
4.	Pengembalian Tunjangan Umum PNS an. Mardika Kusuma Bangun	370.000
		19.209.043

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.708.488.491,00 dan Rp2.543.581.001,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,41% dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada kegiatan Bimbingan Teknis Tanaman Pangan Terstandar, Produksi Benih Kelapa Genjah, Produksi Benih Kopi Arabika dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	597.313.700	645.897.600	(8,13)
Belanja Barang Non Operasional	854.404.521	439.740.908	48,53
Belanja Barang Persediaan	377.632.594	155.884.850	58,72
Belanja Jasa	395.853.595	242.064.602	38,85
Belanja Pemeliharaan	516.408.283	495.026.459	4,14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	966.875.798	564.966.582	41,57
Jumlah Belanja Kotor	3.708.488.491	2.543.581.001	31,41
Pengembalian Belanja Barang	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	3.708.488.491	2.543.581.001	31,41

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp576.130.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2023 tidak memiliki anggaran belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	576.130.000	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	576.130.000	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	576.130.000	#DIV/0!

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp576.130.000,00 dan Rp258.056.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 123,26% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya mutasi tambah pembelian peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	576.130.000	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	576.130.000	#DIV/0!
Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	-	576.130.000	#DIV/0!

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar -100% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2023 tidak memiliki anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-100,00
Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	-	-	-100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp162.802.640.000,00 dan Rp162.802.640.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.485.053.208,00 dan Rp8.485.231.208,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	8.485.231.208,00
Mutasi Kurang	
Penghentian penggunaan	-178.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	8.485.053.208,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	7.880.118.004,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	604.935.204,00

C.2.3. Nilai Aset Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.395.612.329,00 dan Rp15.395.612.329,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.395.612.329,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	0
Saldo per 31 Desember 2023	15.395.612.329,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-2.404.414.786,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	12.991.197.543,00

Tidak terdapat mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.003.550.000,00 dan Rp1.003.550.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp112.190.100,00 dan Rp95.721.850,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-10.500.172.918,00 dan Rp-9.529.800.052,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8.485.053.208	-7.880.118.004	604.935.204
2.	Gedung dan Bangunan	15.395.612.329	-2.404.414.786	12.991.197.543
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.003.550.000	-215.640.128	787.909.872
4.	Aset Tetap Lainnya	112.190.100	0	112.190.100
Akumulasi Penyusutan		24.996.405.637	-10.500.172.918	14.496.232.719

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp193.612.000,00 dan Rp823.046.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali serta dalam proses penghapusan dari BMN. Di Tahun 2023 terdapat Nilai Aset Lain-lain sebesar

Rp193.612.000,00 yang merupakan asset yang tidak digunakan dalam pemerintahan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 satker telah melakukan usulan penghapusan senilai Rp36.500.000,00,- ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Nomer Surat : 4413/PL.130/A/12/2023, tanggal 18 Desember dan saat ini sedang menunggu terbitnya Surat Keputusan penghapusan. Sehingga nilai asset yang belum dilakukan usulan penghapusan menjadi sebesar Rp157.112.000,00.

Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	823.046.000
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-629.434.000
Saldo per 31 Desember 2023	193.612.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-100.524.052
Nilai Buku per 31 Desember 2023	93.087.948

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-100.524.052,00 dan Rp-726.329.303,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	193.612.000	100.524.052	93.087.948
Akumulasi Penyusutan		193.612.000	100.524.052	93.087.948

C.4. EKUITAS

C.4.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp177.391.960.667,00 dan Rp178.366.140.282,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.465.250,00 dan Rp44.135.850,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.300.000	20.400.000	(145,78)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	15.000.000	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.025.250	8.735.850	12,86
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.140.000		100,00
Jumlah	39.465.250	44.135.850	(11,83)

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.760.181.437,00 dan Rp6.764.015.142,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.890.091.360	4.348.958.660	(11,80)
Beban Pembulatan Gaji PNS	50.949	53.707	(5,41)
Beban Tunj. Anak PNS	87.262.946	97.271.716	(11,47)
Beban Tunj. Beras PNS	221.677.620	247.459.140	(11,63)
Beban Tunj. Fungsional PNS	540.710.000	892.030.000	(64,97)
Beban Tunj. PPh PNS	26.406.872	43.293.751	(63,95)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	287.832.690	315.071.168	(9,46)
Beban Tunjangan Umum PNS	100.460.000	91.620.000	8,80
Beban Uang Lembur	71.025.000	104.390.000	(46,98)
Beban Uang Makan PNS	509.464.000	598.667.000	(17,51)
Jumlah	5.760.181.437,00	6.764.015.142	(17,43)

Tidak terdapat perbedaan nilai antara beban belanja pegawai pada Realisasi Anggaran Belanja dengan beban pada Laporan Operasional.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp156.498.950,00 dan Rp1.255.368.975,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	104.388.000	39.960.050	61,72
Beban Persediaan konsumsi	236.509.124	89.641.250	62,10
Beban persediaan lainnya	5.244.370	26.897.650	(412,89)
Jumlah	346.141.494	156.498.950	54,79

Terdapat selisih senilai Rp31.491.100,- pada Beban Persediaan dengan Realisasi Anggaran Belanja Persediaan hal ini disebabkan :

- Adanya belanja persediaan yang bebannya membentuk beban pemeliharaan.
- Adanya belanja pemeliharaan yang bebannya membentuk beban persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.847.571.816,00 dan Rp1.327.703.110,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	770.519.021	250.511.908	67,49
Beban Barang Non Operasional Lainnya	65.435.500	143.129.000	(118,73)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		46.205.000	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	103.560.000	136.080.000	(31,40)
Beban Honor Output Kegiatan	18.450.000	46.100.000	(149,86)
Beban Sewa	120.785.000	4.500.000	96,27
Beban Jasa Profesi	51.200.000	13.000.000	74,61
Beban Keperluan Perkantoran	491.528.900	459.112.850	6,59
Beban Langganan Air	8.478.650	5.535.250	34,72
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17.359.974	13.372.080	22,97
Beban Langganan Listrik	126.722.495	130.049.653	(2,63)
Beban Langganan Telepon	71.307.476	75.607.619	(6,03)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.224.800	4.499.750	(102,25)
Jumlah	1.847.571.816	1.327.703.110	28,14

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp547.899.383,00 dan Rp494.412.359,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	163.580.200	141.994.000	13,20
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	333.875.283	334.105.459	(0,07)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	48.493.900	6.970.400	85,63
Beban persediaan suku cadang	1.950.000	11.342.500	(481,67)
Jumlah	547.899.383	494.412.359	9,76

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp966.875.798,00 dan Rp564.966.582,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	629.945.000	450.543.716	28,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	217.930.798	114.422.866	47,50
Beban Perjalanan Dinas dalam kota	119.000.000	-	100
Jumlah	966.875.798	564.966.582	41,57

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp974.179.615,00 dan Rp1.051.777.235,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten		282.500	#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	455.332.357	455.332.357	-
Beban Penyusutan Irigasi	26.562.415	26.562.415	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.279.100	14.279.100	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.628.749	5.133.720	(41,47)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	474.376.994	550.187.143	(15,98)
Jumlah	974.179.615	1.051.777.235	(7,97)

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		24.000.000	#DIV/0!
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		52.862.030	#DIV/0!
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21.140.000	-	100
Jumlah	21.140.000	(28.862.030)	237

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp178.366.140.282,00 dan Rp178.891.116.747,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-10.403.384.293,00 dan Rp-10.344.099.558,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.429.204.678,00 dan Rp9.819.123.093,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.468.669.928,00
Diterima dari Entitas Lain	-39.465.250,00
Jumlah	9.429.204.678,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp9.468.669.928,00 sedangkan DKEL sebesar Rp39.465.250,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp177.391.960.667,00 dan Rp178.366.140.282,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali sampai dengan 31 Desember 2023 telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :

1. Revisi Pertama tanggal 26 Desember 2023 tentang perubahan data halaman IV DIPA perihal STOK dan Blokir belum dapat dicairkan.
2. Revisi Kedua tanggal 14 Pebruari 2023 tentang pemutahiran data RPD pada halaman III DIPA.
3. Revisi Ketiga tanggal 10 April 2023 tentang penambahan alokasi anggaran senilai Rp750.000.000,- buka blokir kegiatan dukungan manajemen dan cut off anggaran (kode baru BPSIP).
4. Revisi Keempat tanggal 15 April 2023 tentang penambahan alokasi anggaran senilai Rp600.000.000,-
5. Revisi Kelima tanggal 18 Juli 2023 tentang penambahan alokasi anggaran senilai Rp350.000.000,-
6. Revisi Keenam tanggal 10 Oktober 2023 tentang pemutahiran data RPD pada Halaman III DIPA dan Pergeseran alokasi anggaran belanja (52)
7. Revisi Ke Tujuh tanggal 31 Oktober 2023 tentang pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai (51) dan realokasi anggaran belanja barang (52).
8. Revisi Ke Delapan tanggal 24 Nopember 2023 tentang pengurangan alokasi anggaran kegiatan dukungan manajemen dan realokasi anggaran blokir Rp200.000.000,-
9. Revisi ke Sembilan tanggal 19 Desember tentang Penghapusan alokasi anggaran blokir PNBP dalam hal pagu total berkurang.
10. Revisi ke Sepuluh tanggal 27 Desember 2023 tentang Pergeseran alokasi anggaran belanja akun (LDJ) dan pemutahiran data RPD halaman III DIPA.

Sampai dengan tanggal pelaporan terdapat piutang lebih bayar Tunjangan Fungsional senilai Rp251.350.000,- namun sudah terbayarkan senilai Rp39.760.000,- dan sisa yang belum terbayar senilai Rp211.590.000,-. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan jabatan fungsional sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Fungsional Peneliti ke Fungsional Penyuluh sebanyak 2 orang atas nama Ir. I.A. Putu Parwati, MP dan Ni Putu Sutami, SP, MP.
- Fungsional Peneliti ke Fungsional Medik Veteriner sebanyak 2 orang atas nama drh. I Nyoman Sugama dan drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si.

- Fungsional Peneliti ke Fungsional Analis Standardisasi sebanyak 8 orang atas nama : I Nyoman Adijaya, SP, MP, I Made Londra, S.Pt, MP, Ni Luh Gede Budiari, S.Pt, M.Pt, Dr. A.A. Ngurah Badung, Sagung Ayu Nyoman Aryawati, SP, MP, Hadis Jayanti, SP,MP, drh I Wayan Sudarma dan Anella Retna Kumala Sari, MP.
- Rincian piutang lebih bayar Tunjangan Fungsional senilai Rp251.350.000,- disajikan terlampir.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
 SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
 PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 9:06 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,325,250	44,135,850	(25,810,600)	(58.48)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,325,250	44,135,850	(25,810,600)	(58.48)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,325,250	44,135,850	(25,810,600)	(58.48)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,760,181,437	6,764,015,142	(1,003,833,705)	(14.841)
Beban Persediaan	346,141,494	156,498,950	189,642,544	121.178
Beban Barang dan Jasa	1,847,571,816	1,327,703,110	519,868,706	39.155
Beban Pemeliharaan	547,899,383	494,412,359	53,487,024	10.818
Beban Perjalanan Dinas	966,875,798	564,966,582	401,909,216	71.139
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
 PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:06 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	974,179,615	1,051,777,235	(77,597,620)	(7.378)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,442,849,543	10,359,373,378	83,476,165	0.806
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,424,524,293)	(10,315,237,528)	(109,286,765)	1.059
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(28,862,030)	28,862,030	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	24,000,000	(24,000,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	52,862,030	(52,862,030)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21,140,000	0	21,140,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21,140,000	0	21,140,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	21,140,000	(28,862,030)	50,002,030	(173.245)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,403,384,293)	(10,344,099,558)	(59,284,735)	0.573
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,403,384,293)	(10,344,099,558)	(59,284,735)	0.573

Keterangan :
FINAL

Denpasar, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. drh I. Made Rai Yasa, MP

1972019291999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
 SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
 PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 9:08 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	178,366,140,282	178,891,116,747	(524,976,465)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,403,384,293)	(10,344,099,558)	(59,284,735)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,429,204,678	9,819,123,093	(389,918,415)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(974,179,615)	(524,976,465)	(449,203,150)	-
EKUITAS AKHIR	177,391,960,667	178,366,140,282	(974,179,615)	-

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 7 Mei 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
 197209291999031001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
 SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
 PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 9:09 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	162,802,640,000	162,802,640,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,485,053,208	8,485,231,208	(178,000)	0.00
Gedung dan Bangunan	15,395,612,329	15,395,612,329	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,003,550,000	1,003,550,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	112,190,100	112,190,100	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,500,172,918)	(9,529,800,052)	(970,372,866)	10.18
JUMLAH ASET TETAP	177,298,872,719	178,269,423,585	(970,550,866)	(0.54)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	193,612,000	823,046,000	(629,434,000)	(76.48)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(100,524,052)	(726,329,303)	625,805,251	(86.16)
JUMLAH ASET LAINNYA	93,087,948	96,716,697	(3,628,749)	(3.75)
JUMLAH ASET	177,391,960,667	178,366,140,282	(974,179,615)	(0.55)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	177,391,960,667	178,366,140,282	(974,179,615)	(0.55)
JUMLAH EKUITAS	177,391,960,667	178,366,140,282	(974,179,615)	(0.55)
JUMLAH EKUITAS	177,391,960,667	178,366,140,282	(974,179,615)	(0.55)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	177,391,960,667	178,366,140,282	(974,179,615)	(0.55)

Keterangan :

FINAL



Denpasar, 7 Mei 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
 197209291999031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI 633982

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 9:08 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023					2022				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0		
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,762,822,000	9,468,669,928	(294,152,072)	97	9,985,006,000	9,887,258,943	(97,747,057)	99		
C. PEMBAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ichi I Made Kai Yasa, MP

197209291999031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:12 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,468,669,928
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	39,465,250	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,025,250
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8,300,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,140,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,890,309,360	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,992	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	287,832,690	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	87,262,946	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	559,330,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	26,406,872	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	221,677,620	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	509,464,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	100,830,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	71,025,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	491,528,900	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,224,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	103,560,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	770,519,021	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,450,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	65,435,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	377,632,594	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	126,722,495	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	71,307,476	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	8,478,650	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17,359,974	0
3.0	522141	Belanja Sewa	120,785,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	51,200,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	163,580,200	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	333,875,283	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	18,952,800	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	629,945,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,000,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	217,930,798	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 9:12 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
JUMLAH			9,527,344,221	9,527,344,221

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
197209291999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	162,802,640,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,485,053,208	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,395,612,329	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	142,791,000	0
0.0	134112	Irigasi	860,759,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	112,190,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,880,118,004
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,404,414,786
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	64,255,950
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	151,384,178
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	193,612,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	100,524,052
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,468,669,928
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	39,465,250	0
0.0	391111	Ekuitas	0	178,366,140,282
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,025,250
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8,300,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,140,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,890,091,360	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	50,949	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	287,832,690	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	87,262,946	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	540,710,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	26,406,872	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	221,677,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	509,464,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	100,460,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	71,025,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	491,528,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,224,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	103,560,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	770,519,021	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	18,450,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	65,435,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN BALI

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 9:11 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,478,650	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17,359,974	0
3.0	522141	Beban Sewa	120,785,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	51,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	163,580,200	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	333,875,283	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	629,945,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,000,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	217,930,798	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	474,376,994	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	455,332,357	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14,279,100	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	26,562,415	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,628,749	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	236,509,124	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	48,493,900	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,950,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	104,388,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	5,244,370	0
JUMLAH			198,474,972,430	198,474,972,430

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. drh I Made Rai Yasa, MP

197209291999031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
 UNIT ORGANISASI : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 2200
 SATUAN KERJA : 633982

KEMENTERIAN PERTANIAN
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 BALI
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI

Tgl. Cetak 07/05/2024 9:14 AM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker--rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	162,802,640,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,485,231,208	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,395,612,329	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	142,791,000	0
0.0	134112	Irigasi	860,759,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	112,190,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,405,919,010
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,949,082,429
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	49,976,850
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	124,821,763
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	823,046,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	726,329,303
0.0	391111	Ekuitas	0	178,366,140,282
JUMLAH			188,622,269,637	188,622,269,637

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 **KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I : 09 **BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 633982 **BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 07/05/24 9:13 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO		
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3	
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan						
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	15,000,000	0	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,025,250	0	10,025,250	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	21,000,000	8,300,000	0	8,300,000	39,52	39.52
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	36,000,000	18,325,250	0	18,325,250	50.9	50.9
4259	Pendapatan Lain-Lain						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,140,000	0	21,140,000	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	21,140,000	0	21,140,000		
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	36,000,000	39,465,250	0	39,465,250	109.63	109.63
	JUMLAH PENDAPATAN	36,000,000	39,465,250	0	39,465,250	109.63	109.63

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 633982
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALI
BALI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 9:13 AM
 Halaman : 1
 Prtg ID : lap_lra_bel_akun_sakter
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.821,524,000	3.894,964,000	3.890,309,360	218,000	3.890,091,360	99,88	4,872,640
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	56,000	57,000	51,992	1,043	50,949	91,21	6,051
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	280,518,000	288,358,000	287,832,690	0	287,832,690	99,82	525,310
511121	Belanja Tunj. Suami/istr PNS	88,424,000	87,843,000	87,262,946	0	87,262,946	99,34	580,054
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	615,020,000	560,830,000	559,330,000	18,620,000	540,710,000	99,73	20,120,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,384,000	28,848,000	26,406,872	0	26,406,872	91,54	2,441,128
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	224,068,000	222,250,000	221,677,620	0	221,677,620	99,74	572,380
511126	Belanja Uang Makan PNS	673,440,000	515,512,000	509,464,000	0	509,464,000	98,83	6,048,000
511129	Belanja Tunjangan Umum PNS	91,980,000	100,830,000	100,830,000	370,000	100,460,000	100	370,000
511151	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,859,614,000	5,724,692,000	5,708,365,480	19,209,043	5,689,156,437	99,71	35,535,563
5122	Belanja Lembur	71,185,000	71,185,000	71,025,000	0	71,025,000	99,78	160,000
512211	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	71,185,000	71,185,000	71,025,000	0	71,025,000	99,78	160,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,930,799,000	5,795,877,000	5,779,390,480	19,209,043	5,760,181,437	99,72	35,695,563
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	491,536,000	491,536,000	491,528,900	0	491,528,900	100	7,100
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,500,000	4,500,000	2,224,800	0	2,224,800	49,44	2,275,200
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	103,560,000	103,560,000	103,560,000	0	103,560,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	599,596,000	599,596,000	597,313,700	0	597,313,700	99,62	2,282,300
5212	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	599,596,000	599,596,000	597,313,700	0	597,313,700	99,62	2,282,300
521211	Belanja Barang Non Operasional	282,812,000	869,699,000	770,519,021	0	770,519,021	88,6	99,179,979
521213	Belanja Bahan	6,450,000	18,450,000	18,450,000	0	18,450,000	100	0
521219	Belanja Honor Output Kegiatan	65,219,000	65,800,000	65,435,500	0	65,435,500	99,45	364,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	354,481,000	953,949,000	854,404,521	0	854,404,521	89,57	99,544,479
5218	Belanja Barang Persediaan	38,838,000	384,396,000	377,632,594	0	377,632,594	98,24	6,763,406
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38,838,000	384,396,000	377,632,594	0	377,632,594	98,24	6,763,406
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	38,838,000	384,396,000	377,632,594	0	377,632,594	98,24	6,763,406
5221	Belanja Jasa	168,000,000	159,400,000	126,722,495	0	126,722,495	79,5	32,677,505
522111	Belanja Langganan Listrik	72,000,000	77,700,000	71,307,476	0	71,307,476	91,77	6,392,524
522112	Belanja Langganan Telepon				0			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 633982
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/24 9:13 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	8,900,000	8,478,650	0	8,478,650	95.27	421,350
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19,261,000	19,261,000	17,359,974	0	17,359,974	90.13	1,901,026
522141	Belanja Sewa	0	157,400,000	120,785,000	0	120,785,000	76.74	36,615,000
522151	Belanja Jasa Profesi	11,200,000	60,200,000	51,200,000	0	51,200,000	85.05	9,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	276,461,000	482,861,000	395,853,595	0	395,853,595	81.98	87,007,405
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	163,600,000	163,600,000	163,580,200	0	163,580,200	99.99	19,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334,243,000	334,243,000	333,875,283	0	333,875,283	99.89	367,717
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	19,000,000	19,000,000	18,952,800	0	18,952,800	99.75	47,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	516,843,000	516,843,000	516,408,283	0	516,408,283	99.92	434,717
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192,500,000	660,300,000	629,945,000	0	629,945,000	95.4	30,355,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	149,000,000	119,000,000	0	119,000,000	79.87	30,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	160,000,000	220,000,000	217,930,798	0	217,930,798	99.06	2,069,202
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	352,500,000	1,029,300,000	966,875,798	0	966,875,798	93.94	62,424,202
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,138,719,000	3,966,945,000	3,708,488,491	0	3,708,488,491	93.48	258,456,509
	JUMLAH BELANJA	8,069,518,000	9,762,822,000	9,487,878,971	19,209,043	9,468,669,928	97.18	294,152,072

NO	NAMA	SK MENTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	JABATAN FUNGSIONAL LAMA	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL LAMA	JABATAN FUNGSIONAL BARU	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BARU	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BARU AN JABATAN FUNGSIONAL LAMA AL PER BULAN	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SEPTEMBER 2022 S.D AGUSTUS 2023 SERTA GAI KE 13 DAN 14 TAHUN 2023	TELAH DIPOTONG OLEH KEUANGAN SEAK OKTOBER S.D. NOVEMBER 2023 (UNTUK DISETOR)	SETOR KE KAS NEGARA (NTPN)	SELISIH BELUM DIPOTONG/ DISETOR
1	Ir. Ida Ayu Putu Parwati, MP.	No. 1784/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Madya	3.000.000	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	1.260.000	1.740.000	22.620.000	19.000.000	311976UBELLN TZFD	3.620.000
2	NI Putu Sutarni, SP., MP.	No. 1785/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	960.000	790.000	10.270.000	4.000.000	D9AE555DFQKMM RZU	6.270.000
3	dth. I Nyoman Sugama	No. 1778/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Medik Veteriner Ahli Muda	1.080.000	670.000	8.710.000	9.380.000	75B59520AHQBP RG	
4	dth. I Putu Agus Kerawirawan,	No. 1779/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Medik Veteriner Ahli Muda	1.080.000	670.000	8.710.000	7.380.000	F6ADFCIFBAPC NB	1.330.000
5	I Nyoman Adhijaya, SP, MP	No. 1770/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Madya	3.000.000	Analisis Standardisasi Ahli Madya	190.000	2.810.000	39.340.000			39.340.000
6	I Made Londra, S.P., M.P	No. 1771/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Madya	3.000.000	Analisis Standardisasi Ahli Madya	190.000	2.810.000	39.340.000			39.340.000
7	NI Luh Gede Budiarti, S.P., M.Pt	No. 1772/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Analisis Standardisasi Ahli Muda	185.000	1.565.000	21.910.000			21.910.000
8	Dr. Anak Agung Ngurah Badung Sarruda Dinata, S.Pt, M.P	No. 1773/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Analisis Standardisasi Ahli Muda	185.000	1.565.000	21.910.000			21.910.000
9	Sagung Ayu Nyoman Arjawati, SP, MP	No. 1774/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Analisis Standardisasi Ahli Muda	185.000	1.565.000	21.910.000			21.910.000
10	Hadis Jayanti, SP, MP	No. 1775/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Analisis Standardisasi Ahli Muda	185.000	1.565.000	21.910.000			21.910.000
11	dth. I Wayan Sudarma	No. 1776/Kpts/KP 240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Muda	1.750.000	Analisis Standardisasi Ahli Muda	185.000	1.565.000	21.910.000			21.910.000

NO	NAMA	SK MENTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	JABATAN FUNGSIONAL LAMIA	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL LAMIA	JABATAN FUNGSIONAL BARU	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BARU	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BARU	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	TELAH DIPOTONG OLEH KEUANGAN SEJAK OKTOBER S.D. NOVEMBER 2023 (UNTUK DISETOR)	SETOR KE KAS NEGARA (NTPN)	SELISIH BELUM DIPOTONG/ DISETOR
12	Anella Retna Kumala Sari, MP	No. 1777/Kptu/KP-240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Pertama	1.100.000	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	185.000	915.000	12.810.000			12.810.000
	JUMLAH					5.870.000	18.230.000	251.350.000	39.760.000	-	212.260.000



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291999031001